

# Dinamika Konflik Desa Tegal Maja (Studi Kasus: Relokasi Pemukiman Desa Tegal Maja Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)

Rini Hermalia<sup>1</sup>, Nurul Hayat<sup>2</sup>, Stevany Afrizal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: [rinihermalia00@gmail.com](mailto:rinihermalia00@gmail.com)

## Abstrak

Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak bisa lepas dari setiap individu maupun dalam setiap kelompok. Penelitian ini memaparkan mengenai konflik yang terjadi di Desa Tegal Maja kecamatan kragilan kabupaten serang yang terjadi akibat dampak dari pembangunan waduk milik PT. IKPP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika konflik yang terjadi selama proses relokasi pemukiman Desa Tegal Maja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di Desa Tegal Maja Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa dalam dinamika konflik relokasi yang teradi terdapat faktor-faktor penyebabnya yaitu terdapat konflik antar masyarakat pro dan kontra, rendahnya nilai ganti rugi dan tidak terpenuhinya hak moril. Selain itu berdasarkan analisa dari teori fungsi konflik Lewis A Coser dalam penelitian ini terdapat dua tipe konflik yaitu konflik realistik dan non-realistik.

**Kata kunci:** *Konflik, Relokasi, Masyarakat*

## Abstract

Conflict is a part of social life that cannot be separated from every individual or within every group. This research describes the conflict that occurred in Tegal Maja Village, Kragilan District, Serang Regency which occurred due to the impact of the construction of a reservoir owned by PT. IKPP. This research aims to describe the dynamics of conflict that occurred during the residential relocation process in Tegal Maja Village. The method used in this research is qualitative methods. The location of this research is located in Tegal Maja Village, Kragilan District, Serang Regency. The results of this research found that in the dynamics of the relocation conflict that occurred there were factors that caused it, namely there was conflict between pros and cons of the community, the low value of compensation and non-fulfillment of moral rights. Apart from that, based on the analysis of Lewis A Coser's conflict function theory in this research, there are two types of conflict, namely realistic and non-realistic conflict.

**Keywords :** *Conflict, Relocation, Public*

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dalam hidup manusia. Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah sehingga, penggunaannya perlu adanya pembatasan. Tanah selain sebagai tempat tinggal juga sebagai sumber penghidupan untuk mencari nafkah dari pengerjaan pertanian atau perkebunan dan tanah juga diperlukan untuk tempat peristirahatan terakhir manusia. (Muhammad Ilham Arisaputra, 2015).

Permasalahan mengenai pertanahan sudah menjadi masalah baru di Indonesia yang merupakan negara agraris. Tidak jarang dari permasalahan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan konflik, baik itu antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Indonesia terus mengalami pembangunan yang ditandai dengan industrialisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja, dan struktur pendapatan petani di pedesaan (Elizabeth 2007). Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak bisa lepas dari setiap individu maupun dalam setiap kelompok. Konflik yaitu sebagai pertentangan yang bersifat langsung, dan disadari antara individu, atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

Salah satu konflik yang marak terjadi di masyarakat adalah mengenai konflik lahan. Menurut laporan konsorsium pembaruan agrarian (KPA), pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022, meskipun konfliknya berkurang setidaknya ada 241 kasus konflik di Indonesia sepanjang tahun 2023. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638, 2 ribu hektare. Konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Dean G Pruitt, 2011, hal.10). Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menjadi dasar munculnya konflik sosial. Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang biasa terjadi pada masyarakat. Masyarakat yang didalamnya berisi banyak individu dengan pandangan dan tujuannya masing-masing atau berbeda. Dalam mencapai suatu tujuannya setiap individu ada bertemu atau berhubungan dengan individu lain yang mungkin memiliki tujuan sama dengan pemikiran berbeda yang dapat menimbulkan sebuah perselisihan. Jadi, konflik sosial merupakan pertentangan yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat (Kurniawan, 2018).

Terkait dengan masalah konflik lahan, salah satu kasus yang ditemukan oleh peneliti yaitu mengenai konflik terjadi di Kampung Bongas desa Tegal Maja kecamatan Kragilan kabupaten Serang yang terjadi akibat dampak dari pembangunan waduk milik PT. IKPP. Pada tahun 2006 terdapat pembangunan waduk penampungan air limbah cair milik PT. IKPP yang disebut dengan waduk lagoon. Waduk lagoon (*water reserve*) yang berfungsi untuk mengurangi pemakaian air dari bawah tanah sekaligus menjadi cadangan air untuk produksinya pada saat musim panas.

Pada proses pembangunan waduk lagoon inipun sudah meresahkan warga Kampung Bongas karena mobil-mobil besar dengan alat-alat pembangunan mulai berdatangan sehingga tidak ada jarak antara pembangunan dengan pemukiman warga karena waduk lagoon tersebut berada ditengah-tengah pemukiman warga. Waduk lagoon tersebut berada di tengah-tengah Kampung Bongas, kampung pinggir kali dan kampung rangkas. Menurut peraturan menteri pekerjaan umum dan rumah tangga rakyat Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang bendungan menyatakan bahwa jarak garis sepadan waduk yang merupakan batas perlindungan waduk yang ditarik sejauh 50 (lima puluh) meter secara horizontal dari batas terluar dengan pada kondisi muka air banjir ke daratan. Waduk lagoon dibuat berdekatan dengan pemukiman warga sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh warga Kampung Bongas.

Pada tahun 2009 ketika pembangunan waduk lagoon sudah selesai, masalah barupun muncul. Rumah warga yang dekat dengan waduk lagoon pun mulai berdampak, yang ditandai dengan adanya rembesan air di rumah-rumah warga yang menyebabkan kejadian-kejadian seperti rumah rubuh. Hal tersebut tentu sangat mengganggu ketenangan warga khawatir sewaktu-waktu rumah mereka roboh akibat rembesan air dari waduk lagoon tersebut. Untuk itu warga berkoordinasi kepada pemerintah desa agar berkoordinasi dengan PT. IKPP untuk mendapatkan pertanggung jawaban. Setelah berkoordinasi PT. IKPP pun melakukan pertanggung jawabannya dengan melakukan relokasi di kampung yang paling berdampak tersebut yaitu Kampung Bongas, pinggir kali dan rangkas baru. Hal tersebut dilakukan karena PT. IKPP pun sedang berencana untuk melakukan perluasan area waduk lagoon. Disinilah konflik tersebut dimulai, karena terdapat warga yang pro dan kontra dengan adanya alih relokasi lahan tersebut.

Dinamika konflik ini pun semakin kompleks dengan meluasnya konflik dari konflik internal antar warga pro dan kontra menjadi konflik eksternal dengan PT. IKPP. hal ini terjadi karena terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Didalam dinamika konflik yang terjadi ditemukan adanya dua tipe konflik berdasarkan sumber konflik menurut teori fungsi konflik Lewis Alfred Coser. Dengan itupun masyarakat membentuk suatu katup penyelamat. Katup-penyelamat atau *safety valve* (poloma, 2008:108) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempetahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat tersebut disebut panitia relokasi lahan, yang anggotanya masyarakat Kampung Bongas sendiri. Panitia relokasi lahan dibentuk untuk meminimalisir konflik yang terjadi serta melakukan berbagai cara resolusi konflik.

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik yang terjadi akibat relokasi lahan hasil dari dampak pembangunan PT. IKPP maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dinamika konflik yang terjadi di masyarakat. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dinamika Konflik Desa Tegal Maja (Studi Kasus: Relokasi Pemukiman Desa Tegal Maja Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)".

## **METODE**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. (dalam Rahmat, 2009), yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini peneliti ingin memaparkan bagaimana faktor penyebab dan mengetahui bagaimana suatu keadaan atau kondisi konflik yang terjadi dalam masyarakat Desa Tegal Maja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Kepala Desa yang menjabat pada saat proses relokasi, panitia relokasi serta masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Sedangkan data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari sumber literatur seperti catatan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, arsip berupa laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kriteria pemilihan data penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) meliputi: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Konflik Desa Tegal Maja terkait Relokasi Lahan**

Menurut suyono usman konflik pertanahan yang memanas tidak terlepas dari adanya dampak dari kegiatan industri yang kaitannya erat dengan hubungan sosial (Suyoto Usman, 1999). Konflik sosial dipandang sebagai realitas sosial yang niscaya terjadi, baik karena dikehendaki secara sadar, maupun tidak dikehendaki oleh pihak yang terlibat konflik.

Menurut coser suatu konflik dapat berlangsung panjang jika tujuan dari pihak yang menentang konflik itu ekspansif atau meluas. Sebaliknya dapat berlangsung singkat jika pemimpin para pihak yang berkonflik menyadari dan mampu membuuk para anggotanya untuk mengakhiri konflik. Dalam konflik relokasi lahan Kampung Bongas ini konflik semakin meluas, tidak hanya konflik internal antar warga Kampung Bongas yang pro dengan warga Kampung Bongas yang kontra saja, namun meluas menjadi konflik eksternal dengan PT. IKPP. peneliti menemukan adanya berbagai reaksi yang ditunjukkan oleh warga Kampung Bongas pasca mendengar isu relokasi lahan:

### 1. Perbedaan sudut pandang antar masyarakat

Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menjadi dasar munculnya konflik sosial. Selama penelitian, peneliti menemukan didalam masyarakat Kampung Bongas terdapat dua kubu yang bertentangan pada awalnya, yaitu kubu masyarakat pro dan kubu masyarakat kontra. Masyarakat pro berpandangan bahwa masyarakat yang setuju dengan adanya relokasi lahan ini merasa tidak aman, takut sewaktu-waktu waduk tersebut merenggut nyawa masyarakat Kampung Bongas.

Masyarakat yang didalamnya berisi banyak individu dengan pandangan dan tujuannya masing-masing atau berbeda. Dalam mencapai suatu tujuannya setiap individu ada bertemu atau berhubungan dengan individu lain yang mungkin memiliki tujuan sama dengan pemikiran berbeda yang dapat menimbulkan sebuah perselisihan. Masyarakat yang kontra dengan adanya relokasi pemukiman ini menyatakan bahwa masyarakat merasa pindah rumah merupakan suatu hal yang merepotkan karena banyak keperluan yang harus diurus, serta masyarakat berpandangan bahwa mereka sudah hidup lama di Kampung Bongas.

### 2. Nilai ganti rugi rendah

Pembangunan bukan hanya mengeluarkan dampak positif selalu, terkadang pembangunan juga menimbulkan dampak konflik antara pihak yang merasa dirugikan. Solusi ganti rugi relokasi lahan yang kontra merasa dirugikan dengan keputusan pihak PT. IKPP. Masyarakat berpendapat bahwa alasan awalnya tidak mau pindah karena merasa nilai ganti ruginya terlalu kecil. Masyarakat merasa takut tidak bisa mendirikan rumah kembali jika nominal ganti ruginya terlalu kecil karena tidak sesuai dengan harga pasar.

Ketidaksepatan harga ganti rugi itu tidak dialami oleh satu orang saja, tetapi beberapa warga pun mengalami keadaan yang sama. Dari adanya masalah tersebut peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan masyarakat dengan harga yang ditawarkan oleh PT. IKPP. Kemudian peneliti pun mengkonfirmasi harga tanah dan bangunan sesuai dengan harga pasar saat itu kepada panitia relokasi lahan yang menyatakan bahwa masyarakat Kampung Bongas menuntut ganti rugi tanah 2 kali luas tanah yang dimilikinya, sedangkan untuk harga bangunannya pun menuntut ganti rugi 2 kali lipat dengan rician harga bangunan pada tahun 2009 nilai bangunannya rata-rata harga pasar berkisar non-permanen dihargai 800.000/m, bangunan semi-permanen 1.000.000/m, dan bangunan permanen 1.200.000/m.

### 3. Tidak terpenuhinya hak moril

Permasalahan tanah tidak terlepas dari hak-hak khususnya masyarakat pertanian. Hal ini dikarenakan tanah dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi keberlangsungan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa fungsi tanah tidak hanya menjadi tempat pemukiman bagi masyarakat tetapi juga tempat melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu setiap individu maupun kelompok berjuang untuk memiliki tanah dan rela mempertahankannya.

Masyarakat berpendapat bahwa selain materil yang dipertanggung jawabkan, hak moril pun harus dipertanggung jawabkan pula. PT. IKPP dianggap hanya bertanggung jawab terkait materilnya saja, namun acuh dalam pemenuhan tanggungjawab hak moril warga Kampung Bongas. Diketahui masyarakat Kampung Bongas pada tahun 2009 rata-rata masyarakatnya berpenghasilan dari bertani dan menganyam bambu. Sedangkan yang berdampak bukan hanya pemukiman saja tetapi sawah tempat masyarakat bertani pun terkena dampaknya sehingga sawah pun ikut diganti dan nantinya akan diratakan.

Karena warga yang awalnya bekerja diladang akan kehilangan pendapatannya, untuk itu masyarakat kampung bongas juga menuntut PT. IKPP juga bertanggung jawab dengan menpekerjakan minimal 2 orang dalam satu rumah.

## **Tipe Konflik Masyarakat Desa Tegal Maja Berdasarkan Sumber Konflik**

Jika dikaitkan dengan teori fungsi konflik oleh Lewis a Coser. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa konflik dibagi dalam 2 tipe yaitu konflik realitis dan konflik non-realistic.

Dalam teori tersebut disebutkan bahwa konflik dibagi dalam 2 tipe yaitu konflik realitis dan konflik non-realitis.

#### 1. Konflik Realistis

Konflik realitis merupakan tipe bersumber dari hal yang konkret. Hal tersebut dapat diperitungkan karena bersifat materil. Konflik realitis yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan (poloma, 2008:110). Konflik kampung desa tegal maja dikatakan konflik realitis karena warga Desa Tegal Maja meminta ganti rugi secara materil. Konflik di Desa Tegal Maja terjadi akibat adanya pembangunan waduk lagon PT. IKPP. Hubungan sosial diperkirakan menguntungkan partisipan dan yang ditunjukkan pada sasaran yang dianggap mengecewakan.

Hal yang sama terjadi pada masyarakat kampung bongas dimana PT. IKPP menjadikan tanah sebagai komoditas untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara membangun waduk yang berdekatan dengan pemukiman warga dengan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat kampung bongas. Kekecewaan masyarakat terlihat dengan meminta bentuk pertanggungjawaban dengan melaporkan berbagai dampak tersebut kepada pihak pemerintah desa dan pihak PT. IKPP. Hal tersebut sebagai bentuk tindakan perlawanan terhadap PT. IKPP akibat dampak yang ditimbulkan oleh waduk lagoon tersebut.

Selama penelitian, peneliti menemukan adanya sikap solidaritas dan integrasi didalam masyarakat kampung bongas, hal tersebut ditandai dengan bersatunya masyarakat pro dan masyarakat kontra melalui sebuah musyawarah. Musyawarah tersebut beberapa kali dilakukan di Kantor Desa Tegal Maja. Tentunya masyarakat pro dan masyarakat kontra mempunyai tuntutan dan keinginan yang berbeda-beda. Namun, di dalam musyawarah tersebut masyarakat pro dan kontra bersatu untuk berdiskusi tuntutan-tuntutan apa yang akan disampaikan kepada PT. IKPP dan tuntutan tersebut berdasarkan keinginan atau kepentingan bersama. Coser menyatakan bahwa perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial erat. Hubungan yang dekat dikarakteristikan oleh interaksi yang berulang-ulang dan melibatkan kepribadian total dari anggota.

Ikatan-ikatan dalam sebuah kelompok ditegakkan lewat konflik dengan kelompok lain, sehingga kelompok mendefinisikan dirinya sebagai perjuangan dengan kelompok lain. Konflik dengan kelompok luar akan memperkuat kohersi internal kelompok dan meningkatkan sentralisasi. Konflik membuat anggota kelompok lebih sadar tentang ikatan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka.

Hal tersebut terbukti pada saat musyawarah antar masyarakat dengan PT. IKPP. Dalam musyawarah tersebut masyarakat pro dan kontra bersatu menuntut keputusan yang sudah dibuat saat musyawarah antar sesama masyarakat pro dengan masyarakat kontra saja. Karena pada saat berkonflik, suatu kelompok akan menganggap kelompok lain yang terlibat konflik dengannya dianggap sebagai lawan. Sehingga internal kelompok akan bekerjasama bagaimana agar kelompoknya menjadi yang terbaik atau pemenang. Dan akan terbentuk suatu sekat dengan kelompok yang menjadi lawannya. Masyarakat kampung bongas sadar bahwa lawannya pada saat ini adalah kelompok luar yaitu pihak PT. IKPP sendiri sehingga masyarakat pro dan kontra bersatu memperkuat kelompoknya.

Hasil dari perjuangan tersebut menghasilkan keputusan dengan pihak PT. IKPP memberikan kompensasi atau ganti rugi dengan besaran luas tanah diganti 1:1 (satu banding satu), harga bangunan dihargai sesuai dengan jenis bangunan, fasilitas umum seperti masjid, pemakaman, jalan, dll diganti 1:2 (satu banding dua).

#### 2. Konflik Non-realitis

Jenis konflik non-realitis ini bukan berasal dari tujuan-tujuan pesaing yang antagonis. Non-realitis dipicu oleh keinginan yang tidak rasional atau bersifat ideologis. Konflik non-realitis yang ditemukan peneliti yaitu ketika masyarakat meminta ganti rugi



moril karena masyarakat yang mendapatkan pendapatan hasil bertani kehilangan lahan taninya.

Masyarakat Kampung Bongas pada tahun 2009 rata-rata mata pencahariannya sebagai petani dan pengerajin anyaman bambu. Lahan sawah yang digunakan untuk bertaninya ikut terkena dampak dan ikut dijual kepada PT. IKPP, masyarakat petani pun tentu kehilangan pendapatannya. Untuk itu masyarakat menuntut PT. IKPP dengan mempekerjakan 2 orang dalam satu rumah yang direlokasi tersebut ke dalam PT. IKPP sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal tersebut merupakan konflik non-realistis karena dipicu oleh keinginan yang tidak rasional.

Selain itu, menurut Coser, konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan pesaing yang bertentangan tetapi dari kebutuhan untuk meredakan setidaknya salah satu pihak (Coser 1956:49). Karena konflik semakin meluar, masyarakat pun membentuk sebuah kelompok yang berisi tokoh masyarakat Desa Tegal Maja yang bertugas sebagai mediator antara warga Desa Tegal Maja dengan PT. IKPP. Kelompok ini disebut sebagai panitia relokasi. Hal tersebut menunjukkan adanya pihak yang hendak meredakan konflik yang terjadi. Diketahui bahwa terdapat kelompok khusus dalam upaya mengkoordinasi aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan kepada pihak PT. IKPP. hal tersebut sesuai dengan teori fungsi konflik Lewis Alfred Coser, dimana terdapat kelompok khusus untuk meminimalisir ketegangan konflik yang terjadi. Katup penyelamat atau *safety valve* ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempetahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial (poloma, 2008:108).

Panitia relokasi bermusyawarah dengan para warga baik itu yang kontra atau yang pro dengan menghimpun aspirasi dan tuntutan warga kepada PT. IKPP untuk kemudian hasil dari aspirasi dan tuntutan yang sudah dikumpulkan itu untuk disampaikan kepada pihak PT. IKPP. hal ini dilakukan agar mengurangi ketegangan diantara masyarakat yang pro dan kontra dengan kata lain agar semua suaranya terdengar dan hak-hak terpenuhi. Secara tidak langsung kehadiran kelompok panitia relokasi lahan membuat kelompok warga yang pro dan kontra tidak terpecah satu sama lain, karena dalam proses tersebut tidak menyudutkan satu sama lain.

Ketika dalam sebuah kelompok sosial sedang menghadapi masalah atau konflik internal maupun konflik eksternal maka anggotanya harus bersama-sama mencari penyelesaian. Suatu kelompok sosial akan mudah bercerai-berai apabila suatu permasalahan tidak diselesaikan dengan segera ataupun hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak, karena pada dasarnya dalam suatu kelompok sosial berisi banyak orang didalamnya sehingga harus mementingkan kepentingan bersama.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Tegal Maja merupakan konflik yang disebabkan oleh dampak pembangunan PT. IKPP. Faktor penyebab adanya konflik tersebut yaitu karena adanya perbedaan pandangan antar masyarakat, nilai ganti rugi rendah dan terdapat hak moril yang belum terpenuhi. Selain itu didalam penelitian ini terdapat dua tipe konflik menurut sumber konflik yaitu konflik realistis karena warga Desa Tegal Maja meminta ganti rugi bangunan dan tanahnya. Serta konflik non-realistis ketika masyarakat meminta ganti rugi moril karena masyarakat yang mendapatkan pendapatan hasil bertani kehilangan lahan taninya serta masyarakat membentuk sebuah katup penyelamat yaitu panitia relokasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, Adi. 2024. *Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat Pada 2023*. Databoks.katadata.co.id.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

- Elizabeth R. 2007. Fenomena Sosiologi Metamorphosis Petani: ke Arah Keberpihakan pada Masyarakat Petani di PeDesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 25 No. 1
- Dean, Pruitt G dan Rubin Z. Jeffrey. 2004. *Teori konflik sosial*. Pustaka belajar. Yogyakarta
- Gamayanti, Rossa. konflik antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 01. NO.01
- Kurniawan, E. 2018. konflik sosial dalam novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Sosial Lewis A Coser).
- Masyarakat Petani di PeDesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 25 No. 1
- Piter, David. 2022. Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi jambi (Studi tentang Masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah Dengan PT Wiryra Karya Sakti). *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*)
- Polomo. Margaret. M. 2008. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Widiastuti. 2014. Mencari safety valve untuk togaten. IAIN walisongo semarang
- Yustanti, jacky M. 2023. Konflik Sosial Warga Desa Sumurgeneng Akibat Pembangunan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft. *Jurnal Paradigma*. Volume 12, Number 1, pg.139-148, 2023